### BAB I

### PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki pelbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai (tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial). Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.1

Dalam memenuhi kebutuhan pribadi menyangkut, Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*Qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 4

makhruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhannya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.<sup>2</sup>

Fenomena di masyarakat pada zaman kita sekarang, masalah kemiskinan dan problematika ekonomi secara umum telah merasuk akal dan jiwa manusia secara luas. Golongan perusak memanfaatkan masalah ini untuk menakut-nakuti dan mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti pemikiran mereka yang ateis dan sesat, mereka mengklaim bahwa mereka berpihak pada kepentingan masyarakat. Disamping itu, ketidak tahuan umat tentang sistem ekonomi Islam membuat mereka gampang terpengaruh oleh pihak serta terpedaya oleh berbagai propaganda menyesatkan. Untuk mengelabui umat, kalangan musuh menonjolmenonjolkan fakta kehidupan kaum muslimin yang memperhatikan dan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh para ulama pada masa kemunduran.<sup>3</sup>

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai. Dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu.<sup>4</sup>

Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan merupakan program pemerintah yang harus didukung sepenuhnya. Diharapkan masyarakat desa dapat menjadi subyek dalam kehidupannya sekaligus mereka mampu

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, Kiat Islam mengentaskan kemiskinan, h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 181

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Imam Krismanto, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, h. 1

mensejahterakan kehidupan sendiri. Usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan bukan hanya dapat dicapai dengan pemberian fasilitas secara langsung terhadap masyarakat tersebut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya diberikan, tetapi mereka juga berhak mendapatkan kail untuk menangkap ikan tersebut.

Kemiskinan bukanlah suatu yang asing di telinga kita, kemiskinan identik dengan lingkungan kumuh, kotor, dan orang-orang yang tidak memiliki kualitas pendidikan yang baik bahkan cukup. Tak terkecuali dengan negara kita, kemiskinan telah sekian lama menjadi" pekerjaan rumah" bagi pemerintah yang hingga sampai saat ini tak selesai.

Dalam al-Qur'an surat al-isra': 31 menegaskan bahwa manusia harus optimis dan jangan takut karena kemiskinan, karena rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Pemerintah adalah wakil Tuhan yang harus memperhatikan rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 31:

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (al-Isra' ayat 31)<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 286

Dalam menjalankan usaha untuk mensejahterakan masyarakat, koperasi dengan melaksanakan melalui usaha, dan ada yang melakukan usahanya secara multi tujuan, sebaliknya ada koperasi yang terus meluaskan usahanya dalam berbagai usaha yang menghasilkan keuntungan. Modal usaha koperasi didapatkan dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman, pengumpulan hasil usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat gerak koperasi. Setiap tahun tutup buku koperasi harus ada laporan secara tertulis oleh pengurus mengenai neraca untung rugi. Menyangkut kerugian atau keuntungan adalah bersifat tanggung renteng oleh anggota.<sup>6</sup>

Koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam meskipun menurut Muhammad Syaltut dalam Syirka>h ta'awuniyah tidak ada unsur mudharabah, tetapi pada intinya Syaltut mengakui bahwa di dalam koperasi terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian. Salah satu sebab Syaltut berpendapat demikian ialah karena Syaltut melihat koperasi yang ada di Mesir.<sup>7</sup>

P2KP merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan

<sup>6</sup>.Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* h. 123 <sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 294-295

kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun " gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.<sup>8</sup>

Program bantuan untuk masyarakat miskin perkotaan yang terkena dampak krisis ini dibenarkan melalui proyek penanggulangan kemiskinan melalui:9

- 1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja.
- 2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja.
- 3. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif berdasarkan usaha kelompok.
- 4. Penyiapan, pengembangan dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
- 5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eddy Prayitno, *Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*, tt. <sup>9</sup> http:/www.semeru.or.id

Mengingat posisi strategis dana BLM tersebut, diharapkan agar pengelolaan oleh masyarakat benar-benar berorientasi kemanfaatan sebesarbesarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan P2KP, dana BLM dapat dimanfaatkan untuk kegiatankegiatan apapun selama berkaitan langsung dengan upaya perbaikan masyarakat miskin atau bersifat "open menu" selama tidak melanggar ketentuan "Daftar kegiatan terlarang/ negatif list P2KP", untuk memanfaatkan dana BLM sebagai pinjaman bergulir untuk kepentingan produktif. <sup>10</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman bergulir dalam P2KP harus diposisikan sebagai suatu proses pembelajaran masyarakat, terutama masyarakat miskin. Hal ini berarti bahwa pada satu sisi masyarakat diajak untuk mengenal dan belajar tentang prinsip-prinsip pengelolaan dana pinjaman bergulir, sehingga pinjaman tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Akan tetapi, pada sisi lain penerapan prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman bergulir tidak boleh menutup peluang atau kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan akses BLM dengan berbagai persyaratan dan kriteria yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat miskin.<sup>11</sup>

#### B. Rumusan Masalah

http://elisa.ugm.ac.id *Ibid*.

Agar lebih praktis dan operasional, maka dari uraian diatas penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1. Bagaimana sistim yang bergulir pada P2KP di desa baujeng kecamatan beji kabupaten pasuruan?
- 2. Bagaimana tambahan pembayaran utang dari perhitungan modal dalam pelaksanaan P2KP di desa baujeng kecamatan beji kabupaten pasuruan?
- 3. Bagaimana terjadinya utang, ada barang yang ditahan sebagai upaya meningkatkan kemajuan?

## C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran dengan topik yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelusurannya sampai saat ini penulis belum mendapatkan tulisan secara spesifik tentang "Simpan Pinjam Bergulir Pada P2KP ( Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan) Di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Dalam Perspektif Hukum Islam)," Namun ada beberapa mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang pinjaman diantaranya yang ditulis oleh Farida Ismawati Tahun 1997, dengan judul " Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dana Pinjaman Berputar Di Desa Trosobo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Bayolali," secara garis besar inti dari skripsi ini adalah sistem pinjaman yang berlaku pada dana pinjaman berputar dapat dibenarkan menurut

Islam. Karena pinjaman tersebut dapat memenuhi kekurangan modal yang dialami oleh masyarakat desa. Tetapi bunga yang memberatkan masih merupakan perkara yang mutasyabihat.

Adapun mahasiswa yang membahas tentang tanggung renteng diantaranya yang ditulis oleh Maftuhatul lailiyah Tahun 2008, dengan judul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Infaq Produktif di Yayasan dana sosial al falah," secara garis besar inti dari skripsi ini adalah aplikasi infaq produktif dengan sistem tanggung renteng di Yayasan Dana Sosial Al-Falah ini boleh dilakukan tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islami dan mu'amalah seperti prinsip suka sama suka.

### D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penulis harapkan bahwa setiap kegiatan tentunya mempunyai tujuan, terlebih lagi dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui sistim yang bergulir pada P2KP.
- 2. Untuk mengetahui tambahan pembayaran utang dari perhitungan modal dalam pelaksanaan P2KP.
- 3. Untuk mengetahui terjadinya utang ada barang yang ditahan sebagai upaya meningkatkan kemajuan.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis:

## 1. Dari segi teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membanta teori yang sudah ada.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan mu'amalah pada khususnya.
- 2. Dari segi praktis yaitu hasil penelitian diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu lapangan atau di masyarakat.

## F. Konsep dan Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud dari judul skripsi "Simpan Pinjam Bergulir Pada P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan) Di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Dalam Perspektif Hukum Islam)". Maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada pada judul di atas:

Simpan Pinjam : Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan

menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam di Desa

Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.<sup>12</sup>

Pinjaman Bergulir : Salah satu opsi/ pilihan dari berbagai alternatif kegiatan

untuk penanggulangan kemiskinan yang diputuskan

masyarakat secara transparan, akuntabel dan demokratis di

Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.<sup>13</sup>

P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan): Program pemerintah

yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan

kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat

dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk

Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat,

sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian

penanggulangan kemiskinan dan pembangunan

berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan

prinsip-prinsip universal.<sup>14</sup>

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan hiwalah,

riba dan rahn berdasarkan al Qur'an dan hadits serta

pendapat ulama'.

<sup>12</sup> http://www.geocities.com/ineth 84/BABII.doc.

13 http://elisa. Ugm.Ac.id.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Eddy Prayitno, *Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan*, 2007.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah pendayagunaan dan pengembangan masyarakat yang produktif dalam artian masyarakat yang mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan pinjaman yang ada di P2KP di Desa Baujeng, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu memaparkan mekanisme simpan pinjam bergulir pada P2KP (Proyek Penanggulangan kemiskinan diperkotaan)

- 1. Data Yang Dihimpun.
  - a. Aplikasi sistem tanggung renteng di tiap-tiap kelompok swadaya masyarakat (KSM).
  - b. Pengelolaan dana Simpan pinjam bergulir oleh UPK-BKM di Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh sedangkan sumber data yang penulis gunakan adalah:

### a. Data Primer

Yaitu sumber data yang dikumpulkan langsung dari P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan terdiri dari:

- 1) Al Qur'an dan Terjemahnya.
- Hasil wawancara dengan pegawai atau petugas yang di tunjuk untuk memberikan keterangan mengenai simpan pinjam bergulir.
- Hasil wawancara dengan beberapa Anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah buku, kitab, yang pembahasannya berkaitan atau bersinggungan dengan pembahasan skripsi ini.

- 1) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- M. Ali.Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- 3) Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, CV HAJI MASAGUNG, Cet: 2,1989
- 4) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*Dalam Islam, Jakarta, Sinar Grafika, cet: 3, 2004
- 5) Moh Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV*, Semarang, CV. Asy Syifa', Cet: 1, 1994
- 6) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Teknik Wawancara atau Interview.

Wawancara (interview) adalah tanya-jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya-jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh). Dalam wawancara ini ada dua belah pihak yang berinteraksi yaitu yang bertanya disebut dengan interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai atau dalam penelitian disebut dengan responden).<sup>15</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator BKM dan Manager UPK yang menangani simpan-pinjam di P2KP Desa: Baujeng, Kecamatan: Beji, Kabupaten: Pasuruan. 16

### b. Observasi.

Adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau objek penelitian secara seksama (cermat dan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, h. 121

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pada Tanggal 14 september 2008 saya mewawancarai Koordinator BKM: Bapak wahyudi dan Manager UPK: ibu wahyu ernawati

teliti) dan sistematis. Dengan demikian peneliti melakukan pencatatan secara seksama dan sistematis terhadap apa yang bagaimana serta pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dilihat, didengar maupun dirasakan terhadap subyek/ obyek yang diamati tersebut. 17

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada kelompok masyarakat yang menyimpan uangnya di P2KP dan kelompok masyarakat yang meminjam uang di P2KP.

### Dokumentasi.

Adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya. Dengan adanya data tersebut, maka peneliti akan dapat memecahkan masalah penelitian sekaligus usaha membuktikan hipotesis penelitian. 18

Dalam hal peneliti harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan simpan pinjam bergulir pada P2KP.

### 4. Teknik analisa data

Teknik analisa data adalah data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis (menurut teori P. Joko

Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, h.136
Ibid, h: 138

Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*). Adapun metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian yaitu data tentang mekanisme simpan-pinjam bergulir pada P2KP Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan pola pikir induktif yaitu dengan melihat fakta dan hasil data tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang sesuai dengan landasan teori dan diakhiri dengan kesimpulan.

### H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran inti dari permasalahan yang dibahas, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai alur logis dari bahasan skripsi, antara lain sebagai berikut:

Pada bagian bab pertama : pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara global yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dihimpun, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

Pada bagian bab kedua: dijelaskan tentang hukum Islam dalam koperasi yang isinya terdiri dari pengertian koperasi, macam-macam *syirkah*, dasar hukum koperasi, *hiwalah*, *riba*, *rahn* yang fungsinya untuk mengukur tingkat hutang seseorang.

Pada bagian bab ketiga: dipaparkan tentang Praktek Pelaksanaan Simpan Pinjam Bergulir pada P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Yang sub-babnya mencakup Diskripsi wilayah, Profil P2KP di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Proses terjadinya simpan pinjam bergulir pada P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Pada bagian bab keempat: dipaparkan tentang Simpan Pinjam Bergulir pada P2KP ( Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang meliputi koperasi, penanggung hutang, penambahan hutang dan barang jaminan dalam perspektif hukum Islam.

Pada bagian bab kelima: dipaparkan tentang penutup yang meliputi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini, kemudian memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.